

SEKURITISASI ISU SEPARATISME OLEH INDIA SEBAGAI JUSTIFIKASI PENCABUTAN OTONOMI KASHMIR

Harry Prananda Syahputra Daulay¹, Apriwan², Virtuous Setyaka³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹harryprananda21@gmail.com, ²apriwan@soc.unand.ac.id,
³virtuoussetyaka@soc.unand.ac.id

Abstrak

This study examines the securitisation of Kashmir's separatism by the Indian government. This study argues that the government of India's securitisation effort seems like an initial step to revoke Kashmir's special autonomy. This study employed a securitisation framework, emphasising how two main stages of securitisation shape and influence the securitising process, including raising the issue and convincing the audience. I used a qualitative method by using descriptive analysis and secondary data sources. The Finding highlights that in the staging of raising the issue, the Indian government used media and political parties as speech act arena. In convincing the audience, Indian political elites and Indian society become other domains in addressing Kashmir's separatism. Consequently, this thesis argues that revoking Kashmir's autonomy becomes a rational action and has acceptability in public discourse.

Keywords: India, Narendra Modi, Securitization, Separatism.

Received Revised Published

Pendahuluan

India dan Pakistan merupakan dua negara yang selalu memperebutkan mengenai teritori dari wilayah Kashmir, dimana konflik ini tidak pernah selesai. Bagi suatu negara batas teritorial merupakan sebuah hal yang mutlak, sehingga menyebabkan isu-isu atau permasalahan dalam batas negara merupakan sebuah permasalahan yang sensitif. Setelah terjadinya konflik di daerah Kashmir hubungan diplomatik yang terjadi diantara India dan Pakistan semakin tegang, serta pasukan-pasukan dari kedua negara tersebut terlibat saling tembak di wilayah Kashmir.

Konflik yang terjadi di wilayah Kashmir ini merupakan sebuah konflik yang berkelanjutan, untuk meredam konflik tersebut Negara India memberikan otonomi untuk wilayah Kashmir untuk mengelola wilayah Kashmir itu sendiri pada tahun 1954. Dalam pemberian hak otonomi ini tidak terlepas dari peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB). PBB mengeluarkan 11 resolusi Dewan Keamanan yang bersangkutan dengan konflik Kashmir ini di tahun 1948.

Separatisme yang terjadi diwilayah Kashmir bukanlah fenomena yang baru, tindakan separatisme ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat Kashmir terhadap Pemerintah India. Pemberontakan yang terjadi di Kashmir bermula pada tahun 1988 yang dimulai oleh eksklusif muslim. Setelah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1988 tersebut banyak bermunculan gerakan-gerakan separatisme di Kashmir seperti *Jamaat el islami*, dan *Kashmir National Liberation Front*.

Pada tahun 2014 Narendra Modi memenangkan pemilu India bersama dengan partai oposisi nasionalis India yaitu *Bharatiya Janata Party (BJP)*, dimana partai ini mendominasi kursi parlemen dari pemerintahan India, kemenangan ini tidak terlepas dari peran dan kharisma dari Narendra Modi. Setelah kemenangan tersebut Narendra Modi berjanji akan melakukan pencabutan Artikel 370, dimana artikel ini berisikan hak istimewa bagi masyarakat Kashmir untuk melakukan otonomi dari wilayah mereka sendiri.

Setelah terpilihnya Narendra Modi menjadi Perdana Menteri dari Negara India, pada tanggal 5 Agustus 2019 Modi mengumumkan bahwa India akan melakukan pencabutan Artikel 370 yang isinya merupakan sebuah perlindungan untuk masyarakat Kashmir yaitu seperti hak konstitusi dan otonomi. Dalam pidatonya Modi mengatakan “ *Penghapusan Pasal 370 menandakan dimulainya era baru, status Kashmir telah digunakan sebagai senjata oleh Pakistan untuk menghasut sejumlah orang, namun kini India akan menyingkirkan terorisme dan para teroris dari daerah itu*”. Pernyataan lain dari Pemerintah India tentang pencabutan artikel 370 ini adalah “*Sebuah*

era baru telah dimulai di Jammu dan Kashmir dan Ladakh. Pasal 370 merupakan rintangan bagi perkembangan Kashmir. Hak semua penduduk India adalah sama, dan tanggung jawab mereka juga sama. Kerugian yang dilakukan Pasal 370 terhadap orang-orang Jammu dan Kashmir dan Ladakh tidak pernah dibahas. Pasal 370 dan Pasal 35A hanya memberikan separatisme, nepotisme, dan korupsi kepada orang-orang Jammu dan Kashmir”.

Kebijakan dari Pemerintah India untuk melakukan pencabutan Artikel 370 ini sendiri resmi disahkan pada tanggal 31 Oktober 2019. Dengan adanya pencabutan Artikel 370 ini berakibat penolakan dari masyarakat Kashmir sendiri, dimana dengan adanya pencabutan ini bisa jadi memungkinkan pihak *unionist* bergabung dengan kelompok separatis yang ada di wilayah Kashmir itu sendiri. Masyarakat Kashmir juga melakukan demo dan memunculkan slogan yang berarti “ apa yang kami inginkan adalah kemerdekaan”.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini penulis berusaha menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sekuritisasi separatisme oleh India dalam melakukan pencabutan otonomi Kashmir. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menggunakan data-data dari sumber skunder seperti buku-buku, jurnal, berita, dan juga website. Dalam menganalisis penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang relevan dan kemudian penulis sajikan dalam bentuk deskripsi. Analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan konsep sekuritisasi oleh Copenhagen School, yakni Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Konsep ini sendiri dikemukakan dalam buku yang berjudul: *A New Frame Work of Analysis*. Barry Buzan dkk menjelaskan ada dua tahapan dalam melakukan sekuritisasi yaitu tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan *audience*.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Pemunculan Isu

Pada konflik Kashmir, India memunculkan isu separatisme di Kashmir yang dapat mengancam kedaulatan India. Ini dapat terlihat dari India melakukan pencabutan terhadap hak otonomi khusus Kashmir (Artikel 370 dan 35A) pada tahun 2019. Narendra Modi selaku Perdana Menteri dari India melakukan perubahan terhadap konstotusi negara India terkait dengan wilayah Kashmir yang masuk kedalam India yang diberikan otonomi khusus yang tertera pada artikel 370. Pencabutan Artikel 370 merupakan perubahan status dari wilayah Kashmir yang awalnya negara bagian menjadi wilayah kesatuan negara India. Pencabutan otonomi khusus terhadap Kashmir yang dilakukan oleh Pemerintah India bertujuan untuk menghindari terorisme dan separatisme Kashmir. Ini terlihat dari pernyataan PM India, Narendra Modi “teman-teman, saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita akan dapat membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme di bawah sistem (baru) ini”.

India memunculkan isu separatisme Kashmir berkaitan dengan momentum kemenangan yang didapatkan oleh Narendra Modi pada pemilu 2014 bersama partai BJP yang memenangkan mayoritas pada parlemen, ideologi Hindutva dan sentimen nasionalis Hindua telah mengikis fondasi sekuler dari negara India. Berkaitan kuat dengan ideology RSS dan nasionalis Hindu, Modi telah melancarkan upaya pembersihan terhadap etnis Muslim India, serta mereka yang berada di wilayah kependudukan India. Program terhadap Muslim yang diluncurkan oleh India dilakukan melalui undang-undang Amandemen Kewarganegaraan di tahun 2019.

India menggambarkan isu separatisme yang ada di Kashmir merupakan sebuah isu yang membahayakan keamanan negara India dengan melakukan beberapa kebijakan yang telah dibuat India yang berfokus terhadap Kashmir. Pertama, India melakukan kebijakan pemukiman Hindu di Kashmir melalui partai *Bharatiya Janata Party (BJP)* telah mengambil alih pemerintahan

Kashmir yang juga menjadi momentum pertama partai Nasionalis Hindu berkuasa di wilayah Kashmir. India juga melakukan koalisi dengan Pemerintah Kashmir yang mengeluarkan suatu program bersama (*Common Minimum Program*), program bersama tersebut berisi tentang sebuah reformasi terhadap tata pemerintahan Kashmir beserta rincian mengenai permasalahan yang ada di Kashmir seperti permasalahan politik, keamanan, sosial, dan kemanusiaan.

Cara-cara yang dilakukan India dengan melakukan kebijakan-kebijakan merupakan sebuah bentuk respon dan fokus India bahwa tindakan separatisme Kashmir berbahaya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan India bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan dengan India. Pada puncaknya yaitu pencabutan otonomo khusus Kashmir, jika dahulu penyelesaian konflik India dan Kashmir masih menggunakan cara-cara yang bersifat soft atau dengan menggunakan pendekatan yang bersifat dialog, diplomasi, dan negosiasi. Artinya isu ini masih dapat dieskalasi secara terstruktur dan tidak sensitif di tengah masyarakat India. Namun, pada era PM Modi, dengan pengambilan kebijakan yang “keras”, maka isu ini adalah isu yang sensitif dan dapat mengancam kedaulatan India.

Mayoritas Masyarakat India (55%), melihat situasi yang terjadi di Kashmir merupakan sebuah permasalahan yang besar. Ketika ditanya bagaimana permasalahan di Kashmir berubah dalam lima tahun terakhir, sebanyak 53% menyatakan bahwa situasi di Kashmir semakin memburuk. Pandangan terhadap situasi yang baik sebanyak 18% dan yang percaya bahwa kondisinya sama saja hanya 6%. Ketika ditanya terkait bagaimana seharusnya strategi yang harus dilakukan oleh India dalam menyikapi permasalahan separatisme di Kashmir, mayoritas dari menjawab Pemerintah India harus menggunakan kekuatan militer yang lebih besar dalam merespon kelompok separatisme yang ada di Kashmir. Dan yang berpendapat India harus menggunakan kekuatan militer yang sama atau mengurangi kekuatan militer hanya 7%.

Para akademisi India beranggapan bahwa adanya pasal 370 ini malah memberi efek buruk untuk wilayah Kashmir itu sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Brig Narender Kumar dalam penelitian yang berjudul *Rewriting the New Narrative of Jammu and Kashmir*. Dalam karyanya ini, Kumar menyatakan bahwa adanya Pasal 370 hanya akan membuat disjungsi antara hukum dan negara yang membawa pada pembusukan sistemik, pembiakan praktik korupsi, ketidak stabilan, kekerasan dan runtuhnya lembaga-lembaga pemerintah. Hal serupa dinyatakan pula oleh Mishra, yang menyatakan bahwa Pasal 370 hanya menguntungkan bagi para penguasa dan bukan untuk rakyat, sehingga tidak progresif, diskriminatif dan dapat memberikan ancaman keamanan nasional pula. Senada dengan Kumar dan Mishra, Priyadarshi dan Bhardwaj menyatakan pula bahwa hadirnya Pasal 370 ini digunakan Pakistan sebagai senjata mereka untuk merebut wilayah Kashmir dan Jammu.

Kemudian, perhatian publik yang dapat dilihat dari isu separatisme Kashmir adalah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer India. Pada kawasan perbatasan, ada banyak peluang bagi kelompok garis keras untuk melarikan diri dari Afghanistas dan memasuki Kashmir. Seorang Perwira militer yang ada di Kashmir mengatakan “Kami harus melanjutkan patroli kami untuk menunjukkan kepada para militan bahwa kami dapat menjangkau ke mana pun kami mau dan kami dapat mengendalikan situasi,”

Dengan beberapa opini publik yang terbentuk terhadap isu Kashmir, isu ini secara publik dapat dikatakan berbahaya karena dari jejak pendapat Pew Research India mengatakan isu ini penting sehingga perlu adanya tindakan militer dalam menanganinya. Hal tersebut ditambah dari akademisi India yang menganggap Pasal 370 memberikan dampak buruk terhadap India. Oleh karena itu, India melakukan tindakan militernya dengan melihat opini publik yang muncul.

Tahap Meyakinkan *Audience*

Pencabutan Artikel 370 yang dilakukan oleh Pemerintah India menuai penolakan dari Masyarakat Kashmir, mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir Menhooba Mufti mengatakan “ mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total”. Bharatiya Janata Party (BJP) sudah lama menentang adanya Artikel 370 Kashmir, BJP mengatakan “ Integrasi penuh dengan India akan memajukan pembangunan, dan menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan perlakuan berbeda kepada Jammu dan Kashmir karena berpenduduk mayoritas muslim atau karena diakui sebagai bagian dari Pakistan”. Para pemimpin BJP dan pemimpin partai besar di India banyak yang setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India tersebut mereka mengatakan bahwa pencabutan status istimewa Kashmir merupakan sebuah keputusan yang bersejarah.

Shri Amit Shah selaku Menteri Dalam Negeri India menyatakan “selama 70 tahun rakyat India telah menyimpan aspirasi ini di dalam hati mereka bahwa Kashmir harus menjadi bagian integral dari India. Pasal 370 adalah satu-satunya penghalang jalan menuju mewujudkan tujuan ini. Menteri Dalam Negeri berterima kasih kepada Perdana Menteri atas langkah bersejarah ini untuk menghapus hambatan ini selamanya” Pemimpin Partai Opisisi yang berada di Lok Sabha mengangkat masalah pencabutan Artikel 370 yang dilakukan oleh India, ia mengatakan “Bagaimana pusat (Pemerintah India) dapat mengambil langkah ini secara sepihak ketika Kashmir adalah masalah bilateral antara India dan Pakistan dan ketika masalah tersebut tertunda di PBB. Menanggapi hal tersebut Shri Shah menantang partai oposisi bahwa mereka harus mengklarifikasi pendirian mereka apakah mereka mendukung mediasi PBB di Kashmir.

Menteri Dalam Negeri India menjelaskan bahwa Artikel 370 pada awalnya merupakan ketentuan yang bersifat sementara. Karena adanya Artikel 370 pemberlakuan hukum Union of India tidak berlaku di kawasan Jammu dan Kashmir. dikarenakan tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, menjadikan terorisme dan korupsi berkembang di Kashmir.

Mengenai pengerahan pasukan militer di Kashmir dan penutupan fasilitas internet di Kashmir, Shri Shah mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk pencegahan terhadap elemen-elemen yang menghasut kekerasan di India. Shri juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi perdamaian di dalam negeri. Shri Shah juga menegaskan bahwa Pemerintah India tidak akan melakukan pembicaraan dengan elemen separatis dan mereka yang mendukung tindakan terorisme di Kashmir, Pemerintah hanya akan berbicara dengan mereka yang berkomitmen untuk perdamaian dan pembangunan di Jammu dan Kashmir.

Shri Shah berpendapat bahwa melakukan pencabutan Otonomi khusus Kashmir merupakan agenda yang komunal, karena Artikel 370 telah melanggar diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti Sikh, umat Hindu. Shri Shah juga menyatakan bahwa Artikel 370 telah disalah gunakan untuk menabur benih separatisme dan terorisme di Kashmir dan mencegah pembangunan. Shri Shah juga menyatakan bahwa pencabutan Artikel 370 bukanlah kesalahan sejarah, akan tetapi merupakan langkah bersejarah untuk memperbaiki kesalahan bersejarah.

Sebagian besar Masyarakat India tidak mengerti mengapa Jammu dan Kashmir pantas untuk mendapatkan hak otonomi khusus. Partai oposisi di India juga banyak yang mendukung kebijakan India dalam melakukan pencabutan Artikel 370. Para politisi India merasa sudah waktunya bagi seluruh masyarakat India untuk menjadi warga negara yang setara, menurut mereka artikel 370

membuat masyarakat Kashmir merasa terasing dari bangsa India selama 7 dekade.

Berdasarkan beberapa opini para elit politik India, artikel 370 merupakan sebuah alat yang digunakan untuk tumbuhnya benih separatisme dan terorisme di Kashmir, dan juga penyebab tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, serta sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Kashmir. Pencabutan terhadap Artikel 370 merupakan sebuah langkah awal terbukanya pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kashmir, dan sebuah cara untuk memberantas korupsi di Kashmir, serta merupakan langkah awal pembangunan ekonomi di Kashmir. Pencabutan Artikel 370 dianggap sebagai langkah awal untuk membuat Masyarakat Kashmir agar tidak merasa terasing dari India.

Kesimpulan

Dalam kebijakan pencabutan otonomi khusus Kashmir, Pemerintah India melakukan sekuritisasi terhadap isu separatisme di Kashmir yang dapat mengancam kedaulatan India. Pemerintah India menyatakan bahwa pencabutan otonomi khusus Kashmir merupakan cara untuk menghindari terorisme dan separatisme di Kashmir. Pemerintah India memunculkan isu separatisme pada awal kemenangan Narendra Modi pada tahun 2014 bersama partai BJP. Pemerintah India yang didukung oleh nasionalis Hindu memainkan isu agama dalam memunculkan isu separatisme yang ada di Kashmir, hal tersebut diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India yang pro terhadap Nasionalis Hindu yang menjadi mayoritas di India.

Dengan beberapa opini publik yang terbentuk terhadap isu Kashmir, isu ini secara publik dapat dikatakan berbahaya karena dari jejak pendapat Pew Research India mengatakan isu ini penting sehingga perlu adanya tindakan militer dalam menanganinya. Hal tersebut ditambah dari akademisi India yang menganggap Pasal 370 memberikan dampak buruk terhadap India. Oleh karena itu, India melakukan tindakan militernya dengan melihat opini publik yang muncul.

Berdasarkan beberapa opini para elit politik India, artikel 370 merupakan sebuah alat yang digunakan untuk tumbuhnya benih separatisme dan terorisme di Kashmir, dan juga penyebab tidak berlakunya hukum Union of India di Kashmir, serta sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Kashmir. Pencabutan terhadap Artikel 370 merupakan sebuah langkah awal terbukanya pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kashmir, dan sebuah cara untuk memberantas korupsi di Kashmir, serta merupakan langkah awal pembangunan ekonomi di Kashmir. Pencabutan Artikel 370 dianggap sebagai langkah awal untuk membuat Masyarakat Kashmir agar tidak merasa terasing dari India

Daftar Pustaka

Abdul Majid, “ Kashmir: Konflik antara India dan Pakistan,” Sebuah Jurnal Penelitian Asia Selatan,” Vol. 31, No. 1, (Januari-Juni 2016). 49

Alfi Rizky ,”Pengaruh Perebutan Wilayah Kashmir Terhadap Hubungan Diplomatik India-Pakistan Periode 2011-2013,” JOM FISIP, Vol. 3, No. 2. 4

Andrew Whitehead, “Kashmir: the Vajpayee Years,” review dari *Kashmir: the Vajpayee Years* oleh A. S. Daulat dan Aditya Sinha, *Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 54, No. 3 (2016): 437.

Bhardwaj S H, “ Equality in Law in Context of Abrogation of Article 370 & 35 A of Jammu Kashmir”, *Journal of The Gujarat Research Society*, Vol.21, No.2, 2019

Dewi Ayu Septa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi India Dalam Membuat Kebijakan Pemukiman Umat Hindu di Kashmir Tahun 2015, <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37692>. 56

Happymon Jacob, “The Kashmir Uprising and India-Pakistan Relations,” *IFRI Center for Asian Studies* (2016). 13

Kurshid Khan dan Pervaiz Iqbal Cheema, “Modi’s Kashmir Policy: The Probable Consequence for the Security of South Asia,” *Strategic Studies*, Vol. 37 No. 3, (2017): 3.

Mahmud Ershad. “Deconstructing Modi’s Kashmir Policy, 2014-2018.”
Journal of Contemporary Studies. Vol. 7 No. 2 (2018). 7

Mishra N, “ Need of Article 370 in Present Political Setup in India: A
Critical Study”, *International Journal of Multidisciplinary Research and
Development*, Vol.2, No. 3. 2015

Mutiara Ita Dewi, “ Dilema Masalah Kashmir Dalam Kerangka Hubungan
India-Pakistan,” *Mozaik*, Vol. 1, No. 1, Juli 2006

Nurul Its Rosdiana, “ Analisis Pencabutan Pemberlakuan Otonomi
Khusus Kashmir dan Jammu Oleh Pemerintah India”, *Jurnal Ilmu Sosial dan
Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2020. 354

Radha Kumar, “How Manmohan Singh Embarked on a Mission of Peace
in Kashmir from 2004 Onwards,” *Scroll.in Media News*, 27 November 2018,
diakses 1 Desember 2022, melalui [https://scroll.in/article/903070/how-
manmohan-singh-embarked-on-a-mission-of-peace-in-kashmir-from-2004-
onwards](https://scroll.in/article/903070/how-manmohan-singh-embarked-on-a-mission-of-peace-in-kashmir-from-2004-onwards),

Rather, Tariq Ahmad, dkk. “Abrogation of Article 370 of the Constitution
of India: Socio-Economic and Political Implications in Jammu and Kashmir.”
IJJAR Vol. 7, Issue. 3. 512-515

Reshi Manzoor Ahmad,” Kashmir Insurgency: it’s Changing Trends”,
International Journal of Advance Research and Development, Vol. 3, No. 9,
2018.

Rizky Jaramaya, “ Ekonomi Kashmir Turun Drastis Sejak Akses
Dibatasi”, *Republika*, Desember, 18, 2019.

Salma Malik & Nasreen Akhtar, “ Explaining Jammu and Kashmir
Conflict Under Indian Illegal Occupation: Past and Present”, *Margalla Papers*,
Vol.25, No.1, 2021. 28

Samantra Bose, *Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace*, (USA:
Harvard University Press, 2003)